

Nama : Syifa Ruby Zakia
Kelas : 2416041081
Mata Kuliah : Metode Penelitian Administrasi Publik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

**PENGARUH KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH BAGI
MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU TERHADAP TINGKAT
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH PELOSOK DI
KABUPATEN TULANG BAWANG**

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang terus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan serius dalam pembangunan nasional di Indonesia. Walaupun berbagai kebijakan telah dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan, realitas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pelosok dan tertinggal, belum merasakan kesejahteraan secara merata. Hingga kini, meskipun Indonesia telah mencatat pertumbuhan ekonomi positif, kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi topik isu yang belum dapat terselesaikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 25,9 juta jiwa atau sekitar 9,36% dari total populasi nasional. Angka tersebut memang mengalami tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi distribusi kesejahteraan belum merata. Ketimpangan lebih terasa di wilayah perkotaan yang lebih maju dibandingkan dengan wilayah pedesaan atau pelosok yang infrastruktur dan akses layanan publiknya masih sangat terbatas.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kemiskinan tidak dapat dipandang hanya sebagai fenomena rendahnya pendapatan masyarakat, melainkan juga sebagai persoalan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan,

serta infrastruktur dasar. Sukirno (2015) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Artinya, kebijakan pembangunan harus menyentuh dimensi pemerataan agar dapat mengatasi akar permasalahan kemiskinan di masyarakat pelosok.

Di sisi lain, kebijakan sosial berfungsi sebagai instrumen negara untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok miskin, dapat terpenuhi. Suharto (2015) menjelaskan bahwa kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi dari risiko sosial, dan menjamin keadilan distribusi. Hal ini menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) bukan hanya sekadar alokasi dana, tetapi juga merupakan bentuk intervensi negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai bentuk program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta program berbasis desa melalui Dana Desa. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017) menegaskan bahwa Dana Desa tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan desa, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini selaras dengan visi pembangunan nasional yang menekankan pentingnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa.

Kabupaten Tulang Bawang adalah salah satu wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung dengan luas wilayah sekitar 3.466,22 km memiliki 15 Kecamatan dengan 147 Kampung dan 4 Kelurahan. Kabupaten Tulang Bawang adalah merupakan satu daerah yang menunjukkan kemajuan pada pengembangan wilayah sejak bergulirnya program Dana Desa. Pada Tahun 2016 IDM Kabupaten Tulang Bawang memiliki nilai 0,5674 dengan status tertinggal dan memiliki 1 kecamatan sangat tertinggal, 11 kecamatan tertinggal, dan 3 kecamatan berkembang.

Rini, Murniati, dan Affandi (2024) dalam penelitian mereka di Kabupaten Tulang Bawang menemukan bahwa Dana Desa terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran status desa dari kategori tertinggal menjadi berkembang, bahkan sebagian sudah menuju kategori maju. Hal ini memperlihatkan bahwa alokasi Dana Desa mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek infrastruktur, ekonomi produktif, dan pelayanan sosial.

Namun, efektivitas kebijakan bantuan sosial di lapangan tidak selalu sesuai dengan tujuan ideal. Alba (2018), dalam studi kasusnya di Kabupaten Aceh Utara, menemukan bahwa implementasi bansos menghadapi sejumlah kendala, seperti data penerima yang tidak valid, proses birokrasi yang rumit, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Akibatnya, sebagian bantuan tidak sampai pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kelemahan tata kelola dapat mengurangi efektivitas kebijakan sosial.

Penelitian Putra dkk, (2015) juga menegaskan bahwa bantuan sosial yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi memang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kabupaten tertinggal. Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak serta-merta menurunkan angka kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, tingkat pengangguran yang tinggi, dan terbatasnya akses pasar.

Kondisi di Kabupaten Tulang Bawang mencerminkan problematika tersebut. Kabupaten ini masih menghadapi tantangan besar dalam hal pemerataan pembangunan. Sebagian wilayah, khususnya daerah pelosok, masih tertinggal dalam aspek infrastruktur, akses pendidikan, serta kualitas kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan bantuan sosial pemerintah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.

Berdasarkan kajian literatur dan hasil penelitian terdahulu, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan kebijakan bantuan sosial pemerintah belum dapat terlaksana dengan baik. Faktor-faktor ini muncul baik dari aspek teknis maupun non-teknis,

mulai dari kelemahan tata kelola, kondisi, hingga dinamika sosial dan politik ditingkat lokal.

1. Validasi Data Penerima yang Lemah

Masalah paling mendasar dalam implementasi bantuan sosial di Indonesia adalah ketidakakuratan data penerima. Alba (2018) mengungkapkan bahwa di banyak daerah, data penerima bansos tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini menyebabkan adanya rumah tangga miskin yang seharusnya mendapat bantuan justru tidak terdaftar, sementara ada individu yang secara ekonomi tergolong mampu tetap menerima bansos. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kelemahan validitas data ini tidak hanya mengurangi efektivitas kebijakan, tetapi juga menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Warga miskin yang tidak menerima bantuan merasa termarginalkan, sedangkan penerima yang tidak berhak justru memperburuk citra pemerintah. Di Tulang Bawang sendiri, masih ditemukan kasus di mana daftar penerima bansos tidak sesuai dengan kondisi kemiskinan di pelosok desa (Rini et al., 2024).

2. Birokrasi yang Panjang dan Rumit

Penyaluran bansos sering terkendala oleh birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Putra dkk, (2015) menjelaskan bahwa proses penyaluran bantuan harus melalui banyak tahapan verifikasi, mulai dari tingkat desa hingga pusat. Proses ini seringkali memperlambat distribusi bantuan, padahal bansos ditujukan untuk mengatasi kebutuhan mendesak masyarakat. Selain itu, birokrasi yang rumit juga meningkatkan risiko kesalahan administratif. Misalnya, ada kasus di mana data ganda atau salah input menyebabkan bantuan tidak cair tepat waktu. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas kebijakan, karena masyarakat miskin yang membutuhkan harus menunggu lebih lama.

3. Lemahnya Kapasitas Aparatur Desa

Kebijakan bansos sering melibatkan pemerintah desa sebagai pelaksana teknis. Rini dkk, (2024) menemukan bahwa di Tulang Bawang, banyak aparatur desa yang masih terbatas kapasitasnya dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan

penggunaan dana. Aparatur desa juga sering kali tidak memiliki kemampuan administratif yang memadai dalam mengelola data penerima bansos. Keterbatasan ini berakibat pada terjadinya kesalahan teknis, seperti pendataan ganda, keterlambatan laporan, hingga kurangnya transparansi dalam alokasi dana. Selain itu, rendahnya kapasitas juga membuat aparatur desa lebih rentan terhadap intervensi politik dari pihak luar.

4. Kurangnya Transparansi dan Pengawasan

Suharto (2015) menekankan bahwa tanpa transparansi dan pengawasan yang kuat, kebijakan sosial berisiko disalahgunakan. Dalam konteks bansos, hal ini dapat menimbulkan praktik kebocoran dana, manipulasi penerima, bahkan korupsi. Kurangnya pengawasan juga membuat masyarakat tidak memiliki akses untuk memantau jalannya program bansos. Padahal, partisipasi masyarakat dalam pengawasan merupakan kunci agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Rendahnya transparansi membuat akuntabilitas program menurun, sehingga efektivitas kebijakan tidak tercapai.

5. Politisasi Program Bantuan Sosial

Fenomena politisasi bansos sudah sering terjadi di Indonesia. Menjelang pemilihan umum, program bantuan sosial kerap dijadikan alat kampanye untuk menarik simpati masyarakat. Alba (2018) mencatat bahwa di beberapa daerah, distribusi bansos dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal. Penerima bantuan kadang ditentukan bukan berdasarkan kondisi ekonomi, melainkan afiliasi politik. Politisasi ini membuat bansos kehilangan esensi utamanya sebagai instrumen kesejahteraan. Program yang seharusnya netral dan adil menjadi bias, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

6. Keterbatasan Infrastruktur di Daerah Pelosok

Distribusi bantuan sosial di daerah pelosok sering terhambat oleh kondisi geografis yang sulit dijangkau. Menurut Kementerian Keuangan (2017), keterbatasan infrastruktur jalan, transportasi, dan jaringan komunikasi di desa terpencil membuat biaya distribusi meningkat dan waktu penyaluran menjadi lebih lama. Misalnya, masyarakat yang tinggal di desa pedalaman harus menempuh jarak jauh hanya

untuk mencairkan bantuan di bank penyalur atau kantor pos. Kondisi ini menyebabkan sebagian bantuan tidak bisa segera dimanfaatkan, bahkan ada yang terhambat hingga berbulan-bulan. Infrastruktur yang terbatas membuat kebijakan bansos sulit menjangkau kelompok miskin yang paling membutuhkan.

7. Faktor Sosial dan Budaya

Sukirno (2015) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai sosial budaya yang berlaku. Dalam konteks bansos, masih ada masyarakat yang merasa enggan menerima bantuan karena stigma “penerima bantuan” dianggap rendah atau memalukan. Sebaliknya, ada pula fenomena ketergantungan pada bantuan. Sebagian penerima menjadi pasif dan tidak berusaha meningkatkan kemandirian ekonominya karena terbiasa mengandalkan bansos. Hal ini dapat menghambat tujuan jangka panjang kebijakan sosial yang seharusnya mendorong kemandirian masyarakat.

Tabel 1. Tren Kemiskinan di Kabupaten Tertinggal (2020-2024)

Tahun	Kemiskinan (%)
2020	18,5
2021	17,9
2022	17,1
2023	16,7
2024	16,2

Tabel 1 memperlihatkan tren penurunan tingkat kemiskinan yang cukup konsisten, meskipun laju penurunannya relatif lambat. Data ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan, termasuk program bantuan sosial, berkontribusi terhadap perbaikan kesejahteraan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor struktural lainnya.

Tabel.2 Indikator Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang

Miskin-indikator	Indikator Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang (2024)
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	560.324,00
Presentase Penduduk Miskin (Persen)	7,88
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	37,48
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,82
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,17
Kemiskinan Ekstrim	-

Keterangan Data:

Kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) , yaitu sebesar 1,9 US dollar PPP (*purchasing power parity*) per hari. Artinya penduduk yang penghasilan sehari tidak mencapai 1,9 US dollar PPP termasuk ke dalam kategori miskin ekstrem.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan lebih detail sebagai berikut:

- a. Apakah kebijakan bantuan sosial pemerintah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah pelosok Kabupaten Tulang Bawang?
- b. Apakah program bansos yang dijalankan selama ini sudah tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu?

c. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas kebijakan bansos di Kabupaten Tulang Bawang?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan tidak meluas ke topik lain yang kurang relevan, maka ruang lingkup penelitian ditetapkan sebagai berikut:

a. Wilayah Penelitian

Penelitian ini hanya difokuskan pada daerah pelosok Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada karakteristik Tulang Bawang sebagai kabupaten dengan banyak desa tertinggal yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan keterbatasan akses infrastruktur (Rini dkk., 2024). Dengan fokus ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan kondisi nyata implementasi bansos di wilayah dengan keterbatasan struktural dan geografis.

b. Subjek Penelitian

Responden penelitian terdiri dari rumah tangga penerima bansos dan rumah tangga non-penerima bansos yang tinggal di pelosok Tulang Bawang. Perbandingan kedua kelompok ini penting untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kesejahteraan antara penerima dan non-penerima bansos. Selain itu, pandangan masyarakat non-penerima juga diperlukan untuk menilai aspek ketepatan sasaran program bansos.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai:

a. Menganalisis pengaruh kebijakan bantuan sosial pemerintah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah pelosok Kabupaten Tulang Bawang.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan bansos yang dilaksanakan oleh pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis ini penting karena selama ini terdapat anggapan bahwa bansos hanya bersifat (*charity*) jangka pendek, tanpa memberikan perubahan struktural terhadap kondisi sosial ekonomi penerima. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini akan memberikan gambaran empiris apakah bantuan sosial mampu meningkatkan pendapatan, memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, serta kondisi kehidupan masyarakat pelosok di Tulang Bawang.

b. Mengevaluasi sejauh mana kebijakan bansos pemerintah sudah tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi penerima dan non-penerima bansos, untuk melihat apakah program sudah menjangkau kelompok yang benar-benar miskin. Tujuan ini diharapkan dapat mengungkap sejauh mana bansos telah menyentuh masyarakat yang membutuhkan, serta apakah terdapat indikasi kebocoran, politisasi, atau salah sasaran dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, tujuan penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan evaluatif. Hasilnya akan memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas kebijakan bansos, khususnya dalam konteks daerah pelosok dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia seperti di Kabupaten Tulang Bawang.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh Sukirno (2015), yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari peningkatan PDB, tetapi juga dari pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan memperkuat kajian

tentang bagaimana bansos berperan dalam distribusi kesejahteraan di tingkat daerah pelosok.

2. Memperkaya literatur mengenai kebijakan sosial (Suharto, 2015) dengan memberikan bukti empiris terkait efektivitas bansos dalam konteks nyata di Tulang Bawang. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas cakupan kajian akademik tentang hubungan antara kebijakan sosial dan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.

3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji efektivitas program perlindungan sosial di wilayah lain, baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.

b. Secara Praktis

1. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah Tulang Bawang dalam memperbaiki tata kelola bansos, mulai dari perbaikan data penerima, mekanisme distribusi, hingga peningkatan kapasitas aparatur desa.

2. Menjadi masukan bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan, dalam menyusun kebijakan bansos yang lebih tepat sasaran. Hal ini penting agar kebijakan nasional dapat diadaptasi sesuai kondisi lokal, termasuk di daerah pelosok.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi dalam pengawasan bansos. Dengan terlibat aktif, masyarakat dapat memastikan bantuan benar-benar diterima oleh yang membutuhkan serta mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

4. Bagi akademisi dan praktisi sosial, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar analisis dalam menyusun program pemberdayaan masyarakat berbasis bansos yang lebih berorientasi pada kemandirian jangka panjang, bukan sekadar bantuan sesaat.

D. Hipotesis penelitian

Susun hipotesis utama + hipotesis terkait moderator:

1. H1 (Utama): Kebijakan bantuan sosial pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah pelosok Kabupaten Tulang Bawang ($\beta_1 > 0$). (teoretis: Sukirno, 2015; bukti: Rini et al., 2024).
2. H2 (Targeting): Ketepatan sasaran (*targeting accuracy*) memperkuat pengaruh kebijakan bansos terhadap kesejahteraan. Dengan kata lain, efek bansos lebih besar pada rumah tangga yang penerimaannya sesuai kriteria DTKS (interaksi positif). (Alba, 2018).
3. H3 (Kapasitas Aparatur): Kapasitas aparat desa memoderasi hubungan bansos → kesejahteraan; semakin tinggi kapasitas, semakin besar efek bansos. (Rini et al., 2024).
4. H4 (Politisasi): Tingkat politisasi distribusi bansos mengurangi efektivitas bansos terhadap kesejahteraan (efek interaksi negatif). (Alba, 2018).
5. H5 (Infrastruktur): Akses infrastruktur (jarak & kondisi) mempengaruhi efektivitas penyaluran bansos; akses yang buruk mengurangi manfaat bansos (Kemenkeu, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Alba, A. (2018). Kebijakan pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin (Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara). *Asia-Pacific Journal Of Public Policy*, 4(1), 72-89.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017) Buku Pintar Dana Desa. Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
- Putra, E. P., Purnamadewi, Y. L., & Sahara, S. (2015). Dampak program bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan kabupaten tertinggal di Indonesia. *Tataloka*, 17(3), 161-171.
- Rini, A., Murniati, K., & Affandi, M. I. (2024). Analisis Dampak Dana Desa terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Tulang Bawang. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 6967-6977.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.4936>
- Suharto, E. (2015). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2015). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Edisi 2). Jakarta: Kencana.